

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Apeldoorn, L.J. Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.

Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.

Ely, Richard T., 1909, *Outlines of Economics*, The Macmillan Company, New York.

Holmes, Kevin, 2021, *The Concept of Income*, IBFD Publications BV, Amsterdam.

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2018, *Prespektif Keadilan dan Kepastian dalam Penerapan Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Joesoef, Iwan Erar, 2010, *Pembangunan Jalan Tol (Aspek Hukum, Politik & Filosofis)*, CV. Sarnu Untung, Purwodadi Jawa Tengah.

Kurniawan, Anang Mury, 2017, *Pokok-Pokok Tax Treaty: Panduan praktis interpretasi Persejuaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Mansury, R., 1996, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Ind-Hill Co, Jakarta.

Mansury, R., 1996, *Panduan konsep utama pajak penghasilan Indonesia, Jilid 2: Tentang apa yang menyebabkan subyek pajak dikenakan pajak*. PT Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-15*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, CV. Mahakarya Pustaka, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung.

Otto, Jan Michiel, 2012, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Kajian sosio-legal, Pustaka Larasan, Denpasar.

Prins, W.F. dan Adisapoetra R. Kosim, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Cetakan keenam, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*. Andi, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.

Seligman, Edwin R. A., 1919, *Principles of Economics*, Longmans, Green And Co, New York.

Smith, Adam, 2005, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Electric Classic Series Publication, The Pennsylvania State University, Pennsylvania.

Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan I* (Cetakan kedua). PT Refika Aditama, Bandung.

Taussig, F. W., 1911, *Principles of Economics*, The Macmillan Company, New York.

Prosiding Konferensi

Riyanto, Agus, dan Iwan Erar Joesoef, 2020, “Penugasan Badan Usaha Milik Negara dalam pengusahaan jalan tol: Studi penugasan PT Hutama Karya (Persero) dalam pengusahaan jalan tol di Sumatera.” Dalam *Proceedings of the 2nd National Conference on Law Studies 2020 (NCOLS 2020)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.

Tesis

Ramadhan, Aldimas Febrinur, 2023, *Penugasan Pemerintah Dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Kepada PT Hutama Karya (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sugiharto, Muh. Erry, 2018, *Analisis Kesesuaian Hukum Dalam Proses Penunjukan Langsung Hutama Karya Infrastruktur Pada Proyek Jalan Tol Sumatera Terhadap Perundang-Undangan Terkait*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN T.A. 2019; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN T.A. 2020; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN T.A. 2021; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN T.A. 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN T.A. 2023.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada PT Utama Karya (Persero) Untuk Mengusahakan Jalan Tol Ruas Akses Tanjung Priok.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol oleh Perusahaan Patungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol.

Laporan Perusahaan

PT Utama Karya (Persero) dan Entitas Anak, *Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Tanggal dan Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 sampai dengan 2022.*

PT Utama Karya (Persero), 2023, *Company Updates FY22 – 1Q23 Performance.*

PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak, *Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Tanggal dan Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 sampai dengan 2022.*